

PARADIGMA AKAN KEBUTUHAN PUSTAKAWAN DI PERPUSTAKAAN SEKOLAH

MERDANSAH

Abstract; *It is known, that the existence of a librarian in the school library is still relatively small when seen from the number of primary schools and Islamic elementary schools and secondary schools and madrasah tsanawiyah, high schools and madrasah aliyah, amounting to 219 785. While the number of librarians numbered only 2,888 people spread across college and school libraries in the library when the library ideally at least one librarian.*

Kata Kunci: Paradigma, Pustakawan

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, dinegara kita terdapat 169.031 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah 32.962 Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah serta 17.792 Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan. Bila dijumlahkan bersama menjadi 219.785 sekolah dengan total siswa sebesar 44.831.772 jiwa. Andaikata kita menganut “one school one library” dan “one library one librarian” maka akan terdapat 169.081 perpustakaan dan 169.081 pustakawan. Apabila seluruh universitas di Indonesia menghasilkan 1000 pustakawan tiap tahun maka baru dapat dipenuhi selama 219 tahun lebih. Pertanyaan lanjut, pustakawan seperti yang dibutuhkan di perpustakaan sekolah. Sampai hari ini dua perguruan tinggi terkenal (sebagai misal) UI dan UNPAD belum membuat lulusan pustakawan untuk perpustakaan sekolah. Mereka berfikir buat apa membuka jurusan ilmu perpustakaan sekolah bila tidak ada pangsa pasar.

Sampai hari ini terdapat 2.888 pustakawan berbagai jenjang diantaranya bekerja di perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 1225 orang, 493 orang bekerja di perpustakaan khusus 175 orang adalah karyawan Perpustakaan Nasional RI, 692 orang bekerja di Perpustakaan Propinsi, dan sebanyak 78 orang bekerja di Perpustakaan Umum. Tercatat yang bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan sekolah adalah 131 orang di perpustakaan sekolah tingkat SLTP dan 94 orang di Perpustakaan tingkat sekolah SLTA. Pustakawan yang bekerja dijenjang Sekolah Dasar tidak tercatat alias nol. Secara geografis penyebaran pustakawan tidak merata.

Di pulau Jawa terdapat 1.092 orang pustakawan. Di pulau Sumatera bercokol 524 orang pustakawan. Di pulau Kalimantan terdapat 208 pustakawan. Pulau Sulawesi dihuni oleh 427 pularunya. Di Propinsi Bangka Belitung terdapat seorang pustakawan. Dan bahkan di Propinsi Gorontalo tidak ada seorang pustakawanpun. Dilihat dari jenjang jabatan pustakawan terdapat 15 orang pustakawan utama, 220 orang pustakawan madya, 420 orang pustakawan muda, 302 orang pustakawan pratama, 501 orang pustakawan pelaksana, 991 orang pustakawan pelaksana lanjutan dan 439 orang pustakawan penyelia.

Bermain dengan angka sepertinya mengasikan. Seolah-olah kita bisa berbicara banyak mengenai SWOT analysis yang akan ditimpakan pada pustakawan. Secara teoritis benar. Tetapi pada kenyataannya, hanya SATU ALASAN mengapa dalam satu negara yang besar dengan penduduk besar baru terdapat 2.088 pustakawan. Dan dari sejumlah ini, tidak ada satu pustakawanpun yang bekerja di perpustakaan sekolah dasar/MI. Padahal dijenjang ini terdapat 169.031 sekolah, 1.482.928 orang guru dan 29.100.438 siswa. Ternyata bahwa dunia pendidikan direpublik ini masih dilaksanakan secara tradisional terutama untuk tingkat pendidikan sekolah dasar. Kurikulum bisa berubah-ubah tetapi pedagogik sama, meskipun negara kita telah mengalami berbagai orde.

B. PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Tahun 2000 IFLA/UNESCO menerbitkan sebuah manifesto tentang perpustakaan sekolah. "IFLA/UNESCO School Library Manifesto : the School Library in teaching and learning for all". Lebih lanjut manifesto ini menyebutkan : bahwa pemerintah, melalui menteri-menterinya bertanggungjawab atas pendidikan, dan diwajibkan untuk mengembangkan strategi, kebijakan dan rencana yang sejalan dengan dasar-dasar manifesto. Dengan hadirnya manifesto ini diharapkan dapat meningkatkan citra dan fungsi perpustakaan sekolah masing-masing. Misi yang ingin dicapai ialah bahwa perpustakaan sekolah menyediakan informasi dan gagasan yang menjadi dasar untuk membentuk masyarakat yang berbasis informasi dan ilmu pengetahuan. Perpustakaan membekali peserta didik dengan ketrampilan belajar sepanjang hayat dan mengembangkan imajinasinya, dengan demikian memberdayakan mereka dapat

hidup sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Misi ini senada dengan UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : “ mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, beriman, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 dalam BAB 1 Pasal 1 di jelaskan Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan dalam pasal 23 ayat 4 menjelaskan perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan dilingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian pada pasal 23 ayat 5 menjelaskan bahwa perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

C. PARADIGMA BARU

Pembaharuan selalu dikaitkan dengan optimisme dan keraguan. Para pencetus pembaharuan selalu optimis dalam pelaksanaannya. Mereka adalah orang-orang yang anti kemapanan. Sebaliknya penganut status quo selalu beranggapan bahwa pembaharuan berarti suatu nuansa yang masih berupa angan-angan dan tentunya terdapat keraguan dalam praktek.

1. Waktu berubah. Kebutuhan berubah. Pendidikan selalu berkembang dan berubah. Dari pendekatan mengajar secara tradisional ke arah aspek modern yang melibatkan multimedia dan komunikasi elektronik. Pencarian jawaban yang tepat sekarang ini tidak cukup dari satu sumber. Guru tidak dapat lagi diharapkan mengetahui semuanya. Dengan demikian para administrator pendidikan dituntut untuk mengadopsi perubahan yang akan membuat pembelajaran lebih efisien dan efektif. Dasar pemikirannya ialah

keseimbangan antara “content” dan “process” dalam ruang lingkup filsafat pendidikan. Yang dimaksud dengan “content” adalah text book (bahan ajar) dan examination (ujian). Sedangkan “process” mengedepankan proses penggunaan aneka ragam sumber belajar dalam pembelajaran (teaching).

2. landasan filosofis pendidikan yang berubah akan membuat perubahan dalam dalam pedagogi :

- dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid (from teacher centered to student centered). Murid lebih banyak terlibat dalam pembelajaran dan guru bertindak sebagai fasilitator.
- Dari pembelajaran berdasar bahan ajar menjadi pembelajaran berdasar sumber belajar (from text book based learning to resource based learning).
- Dari penilaian sumatif produk menjadi penilaian formatif proses (from summative assessment of products to formative assessment of process).

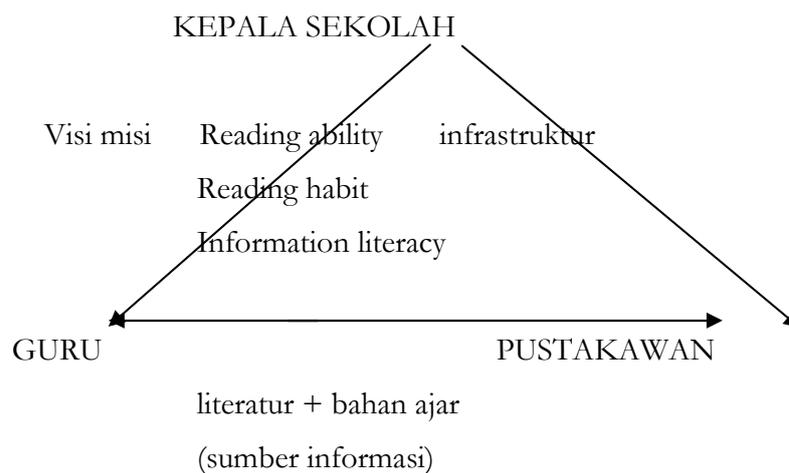
Dan apabila perubahan dalam pedagogi ini terjadi, maka peran perpustakaan akan menjadi signifikans dalam pembelajaran di sekolah (dalam sistem belajar mengajar).

- Perpustakaan berubah dari hanya berperan sebagai “layanan penunjang” (supportive services) menjadi mitra proses pembelajaran.
- Perpustakaan berubah dari penyedia informasi tercetak menjadi koleksi multimedia dinamis yang menyediakan informasi lengkap yang berhubungan kegiatan kurikulum.

D. PERAN PUSTAKAWAN DI PERPUSTAKAAN

Dengan melihat perubahan diatas maka pustakawan akan terlibat aktif dalam pembelajaran di sekolah. Selama fokus pendidikan telah beranjak dari produk pembelajaran kepada proses pembelajaran yang akan menghasilkan outcome maka tugas, fungsi dan dedikasi pustakawan akan semakinbesar peranannya. “Learning for the future puts forward the idea that resource-based learning is a methodology that allows students to learn from their own

confrontation with information resources. Such active learning provides a means by which teachers and librarians are able to tailor information resources, learning activities, the location of those activities and expected learning outcomes to the needs and abilities of each child”. Ungkapan ini sengaja saya sitir, diambil dari Learning for the future : developing information series in school – Australian School Library Assocation, 2001. Maksud sitiran ini tidak lain untuk menggarisbawahi tujuan pendidikan di masa datang. Dengan kata lain dunia pendidikan yang cenderung dilaksanakan secara tradisional, harus mampu berubah dengan semaksimal mungkin memanfaatkan sumber belajar yang dikelola oleh pustakawan yang bersama dengan guru mampu membuat pola-pola sumber belajar. UU no. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 39 ayat (1) menyebutkan ”tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan”. Penjelasan nya mengatakan “tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan kependidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Jadi sebenarnya UU tadi telah memungkinkan adanya “recruitment” pustakawan pada jenjang-jenjang pendidikan. Pola koordinasinya adalah sebagai berikut :



Peran utama pustakawan adalah ikut aktif dalam mengisi tujuan dan misi sekolah termasuk prosedur evaluasi. Bersama-sama kepala sekolah dan guru, pustakawan terlibat dalam pengembangan perencanaan dan implementasi kurikulum.

Pustakawan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal

penyediaan informasi dan mampu menemukan solusi dari setiap problematika informasi dan juga dituntut sebagai seorang ahli yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekolah.

Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengajaran, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sedangkan dalam peraturan Menpan No 9 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Pustakawan adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan dan pengajaran. Pada dasarnya seorang pustakawan sangat berperan dalam kampanye gemar membaca dan mempromosikan literatur anak, media untuk peserta didik, serta menjadi pengayom kebudayaan. Lebih jauh lagi seorang pustakawan adalah bagian dari manajemen sekolah dan harus dinggap sebagai anggota staf sekolah yang profesional yang berhak untuk ikut serta dalam kerjasama dengan anggota sekolah lainnya. Pustakawan harus bekerjasama dengan guru dalam hal :

- Mengembangkan dan mengevaluasi pembelajaran peserta didik
- Mengembangkan dan mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan informasi peserta didik
- Mengembangkan rencana pembelajaran
- Mempersiapkan program membaca
- Memadukan IT dan kurikulum
- Membimbing orang tua murid terhadap peran perpustakaan

Dalam IFLA/unesco – School Library Guidelines disebutkan bahwa peran perpustakaan sangat banyak. Untuk tingkat pendidikan dasar pada hakikatnya peran pustakawan sangat erat hubungannya dengan

- Menganalisis sumber informasi dan kebutuhan informasi
- Menentukan kebijakan untuk mengembangkan layanan perpustakaan
- Membantu peserta didik dan guru dalam memanfaatkan sumber informasi dan IT

- Membangun kemitraan dengan organisasi luar, terutama dengan perpustakaan umum
- Ikut serta dalam tahapan evaluasi belajar peserta didik
- Mengelola dan melatih petugas perpustakaan

E. PERAN GURU

Meskipun agak diluar konteks, sedikit saya menyinggung peranan guru. Dalam hal ini saya utarakan agar kerjasama antara 3 unsur yang di gambarkan di bagian depan menjadi jelas. Bila pandangan guru bertumpu bahwa buku ajar merupakan sumber belajar yang paling penting, lupakan saja perpustakaan sekolah.

Bila guru masih berpendirian bahwa buku ajar merupakan sumber belajar yang paling penting, lupakan saja perpustakaan sekolah. Bila guru masih yakin bahwa kelas itu merupakan satu-satunya sentra dan pengawasan terhadap aktivitas pembelajaran, jangan hadirkan perpustakaan. Bila guru berpendapat bahwa dialah orang yang paling mengetahui segala sesuatunya, maka jangan harap perpustakaan berada dalam angan-angannya.

Guru harus mempunyai kemampuan untuk :

- Menyediakan sumber informasi bagi dirinya untuk memperluas pengetahuan dalam metodologi pembelajaran.
- Mempunyai pandangan lebih progresif tentang ideologi pendidikan.
- Mempunyai gagasan bahwa perpustakaan dapat dijadikan kelas atau minimal menjadi mitra dalam pembelajaran dalam kelas.

F. PERAN KEPALA SEKOLAH

Di negara kita, atau mungkin dimanapun, peran kepala sekolah sangat menentukan maju mundurnya status pendidikan sekolahnya. Sehingga terdapat suatu ungkapan bahwa hanya ada 3 figur yang menentukan dunia pendidikan kita, yaitu menteri, kepala kanwil (kepala dinas) dan kepala sekolah. Visi dan misi serta sasaran sekolah adalah tanggung jawab kepala sekolah. Dan dalam prakteknya

kepala sekolah merupakan manajer dan sekaligus sebagai penanggung jawab keseluruhan program sekolah yang dilaksanakan.

Ketiga tokoh diatas merupakan komponen yang sangat vital dalam mencapai pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seperti yang telah saya kemukakan di bagian depan bahwa dunia pendidikan pada dasa warsa terakhir ini berhadapan dengan paradigma baru. Dalam nuansa baru ini yang menjadi fokus utama adalah peserta didik, sedangkan guru adalah fasilitator. Perangkat pembelajaran berubah dari buku ajar kepada resource-based yang dalam artian harfiah adalah perpustakaan.

Education has moved from the product of learning, through and onwards to the process of learning. Learning processes and outcomes are at the forefront of the educational community ” oleh sebab itu pendidikan sekarang ini ditujukan untuk mengembangkan layanan informasi di sekolah-sekolah, membangun standar perpustakaan sekolah sebagai mitra pembelajaran dalam kelas. Dalam suatu laporan kerja NILIS (National Institute for Library and Information Science) University of Colombo – Sri Lanka mengemukakan bahwa “program yang dilakukan oleh perpustakaan sekolah modern berpusat pada peserta didik. Melalui berbagai model pemecahan masalah yang telah dilakukan dan dievaluasi serta ditelaah ternyata mampu membentuk peserta didik yang lebih berhasil dalam menempuh ujian nasional dan test terukur lainnya. Karena mereka dibiasakan aktif terlibat sendiri dalam pembelajaran, kecenderungan metode ini disebut Information Literacy. Dan Information Literacy ini adalah sesuatu proses pembelajaran. Suatu alat yang ampuh untuk pendidikan dewasa ini. Penerapannya di negara kita memerlukan keharmonisan gerak dari berbagai kalangan untuk merubah pendekatan pedagogis serta pendekatan metodologis di sekolah. Paling tidak information literacy dapat dibentuk sebagai “ agen perubahan ” dalam dunia pendidikan. Informasi literacy lebih jauh dapat mengakomodir pustakawan yang selama ini lahannya kecil dan terbatas. Berkiprah di perpustakaan sekolah dengan jaminan menjadi tenaga kependidikan dengan karir sebagai tenaga fungsional sungguh merupakan suatu tantangan bagi para pustakawan.

Dalam bagian terakhir orasi saya ini saya tidak berani membuat kesimpulan. Karena masih banyak faktor yang mempengaruhi perubahan dalam cara belajar

seperti saya kemukakan. Jalan masih panjang dan information literacy skill learning masih harus menempuh berbagai fase mulai dari pengenalan, persiapan loka karya, sosialisasi dan penerangan. Rasanya kita harus mulai dari sekarang. Negara kita menganut wajib belajar 9 tahun. Oleh sebab itu pembabakan dalam pembelajaran di sekolah adalah :

- Kelas 1 sampai dengan kelas 3 beban pembelajaran berada pada kurikulum inti “calistung (membaca, menulis, berhitung)”. Dalam hal membaca peserta didik dibimbing dalam kemampuan baca (reading ability). Mereka harus diperkenalkan dengan bermacam ragam buku dengan gambar dan tulisan, cerita yang pendek dan menarik, perwajahan buku yang atraktif sehingga menimbulkan keinginan untuk membaca (reading interest). Ini semua adalah tugas utama pustakawan.
- Kelas 4 sampai dengan kelas 6 beban pelajaran membaca berada pada level kebiasaan membaca (reading habit). Koleksi perpustakaan harus bertambah banyak. Tugas pustakawan juga lebih banyak yaitu dengan bimbingan membaca secara individual berdasar pada keinginan tiap peserta didik. Information Literacy dapat diperkenalkan secara dini.
- Kelas 7 sampai dengan kelas 9, disuguhkan pelajaran information literacy secara penuh. Koleksi perpustakaan bertambah dengan multimedia, internet dsb.

Dengan demikian, bila sekolah memiliki satu perpustakaan, maka koleksinya harus lengkap disamping bahan tercetak juga bahan terekam, multimedia, audio visual, internet, dll. Lalu pustakawannya seperti apa? Pada dasarnya adalah pustakawan yang dituntut sebagai “teacher librarian”. Dia seorang pustakawan yang bertugas sebagai guru pembimbing. Dia bukan pendidik tetapi tenaga kependidikan. Di negara kita terbalik yang disebut guru pustakawan ialah guru yang ditugaskan mengelola perpustakaan dengan atau tanpa pelatihan kepustakawanan. Jadi sebenarnya guru pustakawan di negeri ini tidak ada. Lebih lanjut ditambahkan dalam IFLA/UNESCO School Library Guidelines bahwa pustakawan di perpustakaan sekolah pemimpin gerakan kampanye membaca dan mempromosikan literatur anak. Pertanyaan lanjutnya, apakah keterampilan dalam membimbing membaca dan mempromosikan

literatur anak, mengetahui lokasi dan ketersediaan literatur (literature availability), berceritra, dan memilah literatur sesuai dengan perkembangan jiwa anak diajarkan di Perguruan Tinggi yang menawarkan gelar pustakawan ? Pertanyaan lagi adalah apakah lulusan D2 (pustakawan pelaksana) diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit membimbing membaca? Ataukah kepala perpustakaan sekolah SD minimal harus pustakawan pelaksana lanjutan atau harus pustakawan tingkat ahli ? Ini juga perlu dikaji dan atau duduk bersama dengan Depdiknas dan dicari jalan penyelesaiannya.

G. KEBUTUHAN PUSTAKAWAN

Seperti yang sudah saya uraikan di bagian depan bahwa pada taraf pendidikan dasar dimana anak mulai dipacu perkembangan minat bacanya, kita kekurangan tenaga dalam menangani perpustakaan. Baik dalam masalah manusianya, materinya maupun dananya. Untuk menaggulangi kekurangan daya ini perlu kiranya pihak terkait seperti Perpustakaan Nasional, Depdiknas, Depdagri dan Depag duduk bersama memecahkan masalah perpustakaan dalam dunia pendidikan dasar.

1. Depdiknas dan Depag membuka rekrutmen untuk pustakawan di sekolah sekolah, terutama tingkat pendidikan dasar. Untuk sementara guru yang selama ini ditugaskan mengelola perpustakaan dapat dialih jalurkan menjadi pustakawan;
2. Perguruan tinggi yang mempunyai jurusan ilmu perpustakaan atau information studies di sarankan untuk lebih banyak mencetak pustakawan untuk sekolah.
3. Perpustakaan Nasional yang bertindak sebagai pembina perpustakaan sekolah dapat memerankan pembinaannya melalui berbagai bantuan berupa pelatihan, penataran, orientasi. Bantuan lainnya berupa pengalih tugas karyawan. Hal yang sama dapat dilakukan oleh perpustakaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, lebih lanjut disarankan agar Perpustakaan Nasional dijadikan pusat pengadaan dan penyebaran pustakawan seluruh indonesia.

Kebutuhan akan pustakawan akan lebih terasa lagi bila sekolah menerapkan perpustakaan dalam pembelajaran. Dalam arti mensinergikan perpustakaan dengan kelas, melalui *information literatur skills learning*.

Menyinggung sedikit tentang *Information Literacy*, seperti yang telah disinggung dibagian depan bahwa waktu berubah. Dunia pendidikan dan pendidikanpun berubah. "Teacher can no longer be expected to know all answers" Guru tidak lagi diharapkan mampu menjawab semua pertanyaan peserta didik. Untuk itu penelusuran atau pencarian jawaban yang tepat dewasa ini tidak bisa mengandalkan hanya satu sumber. Kita memerlukan banyak sumber, dan cara ini disebut *Information Literacy*. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran (*student centered*) harus lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka belajar

1. What information do I need? Informasi apa yang saya butuhkan?
2. What type of sources can I approach? Sumber apa yang perlu saya pakai?
3. Where are they? Dimana saya harus mencari?
4. Are they accurate, suitable? Apakah tepat, cocok?
5. How do I collect them? Bagaimana cara menyimpulkannya?
6. How do I organise them? Bagaimana cara mengorganisasikannya?
7. Have I got what I need? Cukupkah apa yang saya butuhkan?
8. How do I present it? Bagaimana menyajikannya?

Langkah-langkah pertanyaan mengenai informasi ini merupakan basis pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Dengan kata lain mereka belajar bagaimana cara belajar. *Learn how to learn!* Pembelajaran seperti ini melibatkan guru dan pustakawan serta perpustakaan yang cukup handal dalam menanganinya.

Penulis: Merdansyah, S.H.I, Pustakawan IAIN Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang N0 43 Tahun 2007

Baderi, Athaillah (2003), *Gerakan Nasional Membaca ; Suatu Pemikiran Ke Arah Akuntabilitas Pemerintah*, Jakarta : Perpustakaan Nasional. RI

_____ (2005), *Kiat dan Strategi Meningkatkan Minat Baca Masyarakat ;* Teknis perpustakaan sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Jakarta ; Departemen Dalam Negeri.

Delly H. Dadang, DR. M.Si (2005) *Strategi Dinas Pendidikan, Dalam Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat*, Bandung : Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Daerah Jawa Barat.

Doman, Gleen (1991 : 19) *Mengajar Bayi Anda Membaca*, penerjemah Ismail Ibrahim, Jakarta ; Gaya Favorit Press.

Hiroko, Yamanto (2001), *Mengembangkan Minat Baca Masyarakat Jepang*, Jakarta : Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB)

Sondakh, Angelia, SE (2005), *Perpustakaan dan Peningkatan SDM*, Bandung : Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Daerah Jawa Barat.

Tillaar, H.A. R (1999), *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional ; Dalam Prespektif Abad 21*, Magelang : Indonesia Tera